

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Badan Pusat Statistik Kota Padang (2023). *Kota Padang Dalam Angka 2023*. Kota Padang.
- Eko Murdiyanto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Pers.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Inu Kencana Safei. (2007). *Good Government*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Keban, Y. T., (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Edisi Ketiga*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sampara Lukman. (2000). *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Sedarmayanti, D. (2003). *Good Governance (Kemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka otonomi daerah*. Bandung: PT Mandar maju.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2016). *Dasar-Dasar Public Relation*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suprijadi, A. (2005). *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada SektornPublik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Inonesia.

### *Jurnal*

- Haryono dan Wahyu Eko Pujianto. (2013). “Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Kecamatan Gedangan.” *Jurnal UMSIDA* Vol. 1, No. 1, Maret 2013, 1-110
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*) Pada Kantor Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* Vol. 3.1, 222-228.

- Nasution, Syaifulah, and Agnes Fitryantica. (2023). "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Bidang Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi E-Open di Kota Bekasi." *FOCUS* Vol. 4.2: 198-204.
- Puspitasari, D. (2016). "Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kediri." *Jurnal Doctoral dissertation*. Universitas Brawijaya.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP)." *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVII, 193-201.
- Razak, A. (2020). Kualitas Pelayanan E-KTP Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).
- Riswati. (2021). "Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia." *Jurnal Media Demokras*, 1-15.
- Salsabilla, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). "Penerapan E-Govrnment Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 314-324.
- Varenty, T., Zetra, A., & Zulfadli. (2019). "Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang." *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, 114-125.

### **Website**

- Azirwan. (2018). "Dugaan Pungli di Disdukcapil Harus ada Bukti Konkrit." *topsumbar.co.id* <https://www.topsumbar.co.id/2018/07/azirwan-dugaan-pungli-di-disdukcapil-harus-ada-bukti-konkrit/>
- Disdukcapil Kota Padang. (2023). "Mekanisme dan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk." *disdukcapil.padang.go.id* <https://disdukcapil.padang.go.id/>
- MC Kota Padang. (2022). "Dua Inovasi Dukcapil Padang Masuk Nominasi Pelayanan Publik Kota Padang 2022." *Infopublik.id*, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/663203/dua-inovasi-dukcapil-padang-masuk-nominasi-pelayanan-publik-kota-padang-2022?video=>

- MC Kota Padang. (2020). "Layanan Tatap Muka di Disdukcapil Padang Melalui Online." *Infopublik.id*, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/449266/index.html>
- Novitri Selvia. (2023). "Pengunjung SIRANCAK Capai 400 Orang." *Padek.jawapos.com*, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/05/04/2023/pengunjung-sirancak-capai-400-orang/>
- Republika.co.id. (2018). "Ombudsman: Ada Tiga Catatan Pelayanan Disdukcapil Padang." *Republika.co.id*, pp 1-2. <https://www.republika.co.id/berita/pccclmt430/ombudsman-ada-tiga-catatan-pelayanan-disdukcapil-padang>
- SIRANCAK. (2023). "Inovasi terbaru Disdukcapil Kota Padang Tahun 2023." *Sirancak.disdukcapil*. <https://sirancak.disdukcapil.padang.go.id/>
- TECH - Tim Redaksi, CNBC Indonesia. (2024). "Warga RI Wajib Aktifkan e-KTP Jadi IKD di 2024, Ini Faktanya." *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240102085114-37-501917/warga-ri-wajib-aktifkan-e-ktp-jadi-ikd-di-2024-ini-faktanya>

### ***Dokumen Dokumen***

- Direktorat Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil Kemendagri. 2011. *KTP Elektronik*. Jakarta: Departemen dalam negeri.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang kependudukan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002
- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaPadanh Nomor 21 Tahun 2021 tentang standar pelayanan publik Disdukcapil Kota Padang
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik

- Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi kelurahan.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang
- Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum mempunyai Tugas dan Fungsi
- Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.